

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Petani adalah pilar dari kesejahteraan bangsa, karena sebagai penggerak pertanian yang mampu menghasilkan kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri, penyedia lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai negara agraris dan maritim lebih memprioritaskan kebijakan kepada pemberdayaan petani kecil. Sehingga dengan kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan karakter petani yang sukses dan tangguh dalam menghadapi persaingan global menuju pembangunan pertanian Indonesia yang lebih baik.

Arus globalisasi yang sudah tidak dapat ditahan lagi untuk mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik disadari maupun tidak, serta kerusakan lingkungan global pun berimbas ke lingkungan hidup kita sehari-hari. Perjanjian perdagangan dunia bidang pertanian yang sering disebut sebagai perjanjian pertanian (*Agreement on Agriculture, AoA*) mengatur perdagangan bidang pertanian. Sejak itu semua hasil pertanian dari negara lain akan bebas masuk dan diperjualbelikan di negara kita melalui jalan ekspor-impor. Sehingga jika tidak ada dukungan yang menyeluruh dari masyarakat Indonesia terhadap pertanian terutama dalam pemberdayaan petani kecil, dikhawatirkan akan timbul berbagai masalah serius yang dapat menimbulkan ancaman bangsa, seperti krisis ekonomi, kekurangan bahan pangan, pengangguran, kriminal, gizi buruk (malnutrisi), dan berbagai masalah lainnya yang dapat merugikan rakyat Indonesia terutama rakyat kecil yang paling rentan dengan pengaruh atau dampak dari globalisasi tersebut.

Dalam mewujudkan karakter petani desa yang mandiri, sukses, dan tangguh dalam menghadapi pengaruh globalisasi tidak semudah yang kita bayangkan tetapi perlu bertahap dan terkendali, serta diperlukannya kontribusi dari pihak-pihak lain di luar petani seperti pemerintah, pengusaha, industriawan, pemilik modal, perguruan tinggi, peneliti, LSM, dan lain-lain. Sehingga yang diharapkan adalah bahwa semua pihak yang terkait mampu bekerja sama satu sama lain. Masing-masing pihak diperbolehkan memperjuangkan kepentingan serta agendanya sendiri, asalkan masih dalam satu satuan kerangka kerja yang sama dan diharapkan mampu terjadi kerjasama yang sinergis serta saling menguntungkan. Hal ini hanya terjadi apabila pihak-pihak terkait mampu melihat ketergantungannya satu sama lain dan bersedia menyumbangkan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut dan sekaligus mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi terhadap petani kecil serta guna membentuk petani desa yang mandiri dan sukses menuju ketahanan pangan bangsa. Maka dari itu, kami mengajukan ide program pemberdayaan petani desa dengan dibentuknya Balai Pemberdayaan Petani Desa yang berfungsi sebagai mediator yang akan memberikan bantuan dan bimbingan kepada petani desa sekaligus membantu menghubungkan atau membangun kerja sama yang baik antara petani dengan pihak-pihak lain, serta sebagai pusat informasi dan pendidikan bagi petani desa. Balai pemberdayaan petani desa ini dianggotai oleh koordinator dari setiap

kelompok tani yang berasal dari masing-masing desa yang bertempat di setiap kecamatan dengan kerja sama dari Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membatasi beberapa rumusan masalah. *Pertama*, seberapa besar peran pertanian desa sebagai penyokong kecukupan pangan dan kemajuan bangsa. *Kedua*, permasalahan dan faktor penghambat keberhasilan petani desa. *Ketiga*, bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani desa agar terbentuk karakter petani yang mandiri dan sukses dalam menghadapi tantangan globalisasi serta menuju kemandirian pangan bangsa.

Tujuan dan Manfaat

Karya tulis ini disusun memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, untuk mengetahui kesulitan atau hambatan keberhasilan dari petani desa. *Kedua*, untuk memberikan gambaran manajemen baru pemberdayaan petani desa. *Ketiga*, untuk mengetahui seberapa besar peran petani kecil dalam membangun kemandirian pangan dan kemajuan bangsa. *Keempat*, untuk menemukan solusi dalam mengatasi peningkatan kesejahteraan petani kecil. *Kelima*, untuk membantu pemerintah dalam penyiapan pengambilan kebijakan kepada petani kecil sebagai penggerak pertanian menuju kesejahteraan bangsa.

Karya tulis ini mempunyai beberapa manfaat. *Pertama*, adanya Balai Pemberdayaan Petani Desa sebagai media pembentukan karakter petani desa yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. *Kedua*, membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di desa. *Ketiga*, mencerdaskan petani dan generasi muda dalam menciptakan lapangan kerja. *Keempat*, merupakan wujud aksi pertanian yang terpadu (*Integrated Farming*) menuju kemajuan dan kemandirian pangan bangsa dalam menangkal dampak negatif dari arus globalisasi.

GAGASAN

Peran Pertanian Desa dalam Kesejahteraan Bangsa

Petanian adalah hal yang substansial dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri, penyedia lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara. Adalah wajar apabila bangsa Indonesia sebagai bangsa yang membangun selalu meletakkan pembangunan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam pembangunan selama lima PELITA terakhir. Titik kulminasi pembangunan pertanian dalam hal ini pertanian tanaman pangan terjadi pada tahun 1984, yaitu saat Indonesia yang sebelumnya mendapat predikat sebagai negara pengimpor beras terbesar ini dapat mencapai swasembada beras dengan program “Bimas”-

nya. Memang hasil yang spektakuler, akan tetapi banyak pertanyaan yang muncul. Apakah metode pertanian yang diterapkan dalam pencapaian swasembada beras (Revolusi Hijau) tersebut masih tepat sebagai jawaban dalam pemenuhan kebutuhan pangan?. Sementara, akibat yang ditimbulkan sangat merugikan dalam hal, antara lain: Menurunnya produktivitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia anorganik secara berlebihan yang memang berfungsi sebagai suplemen untuk bibit unggul agar mendapatkan hasil yang maksimal, rusaknya keseimbangan ekosistem akibat penggunaan pestisida yang tanpa disadari juga mengakibatkan matinya spesies lain selain hama dan penyakit tanaman. Dengan tidak disadari pula, bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pupuk dan pestisida anorganik memerlukan biaya yang relatif mahal. Apalagi bila subsidi terhadap pupuk ditarik oleh pemerintah yang berimplikasi pada semakin tingginya biaya produksi dalam usaha tani.

Dunia usaha pertanian saat ini dihadapkan pada dilema, apakah akan tetap mempertahankan pola pengelolaannya seperti ini dengan menggunakan lebih banyak input luar (obat-obatan dan pupuk buatan), atau dengan menggunakan lebih banyak input dalam (kompos, pupuk kandang, dan obat-obatan alami). Dua pilihan ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika memilih lebih banyak menggunakan input luar, dalam jangka pendek kebutuhan akan hasil-hasil pertanian akan dapat dipenuhi, akan tetapi dalam jangka panjang, akan mengalami penurunan yang drastis akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Sebaliknya, jika pilihan jatuh pada penggunaan input dalam yang lebih banyak, maka dalam jangka pendek kebutuhan akan hasil-hasil pertanian tidak dapat dipenuhi. Akan tetapi, dalam jangka panjang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan akan hasil-hasil pertanian secara berkesinambungan (Susilo, 2005).

Arus Globalisasi Penyebab Keterpurukan Berkepanjangan

Masuknya MNC (*Multinational Corporate*) industri pangan ke Dunia Ketiga ini, selalu dikampanyekan sebagai berkat karena mereka mempunyai modal besar dan teknologi. Produksi makanan dapat ditingkatkan lewat bioteknologi yang terjadi. Kedatangan MNC justru mengguncangkan pertanian negara yang didatangi, di samping kehancuran ekologi, belum lagi masalah sosial yang menjadi akibatnya. Globalisasi industri pangan malah membuat petani menderita, bahkan kelaparan. Memang dalam teori perdagangan internasional, ekspor yang tinggi dapat meningkatkan perolehan devisa, dan devisa yang diperoleh dapat dipakai untuk membiayai impor aneka macam kebutuhan, terutama bahan mentah. Strategi pertumbuhan yang dipacu oleh ekspor ini amat populer pada tahun 1980-an setelah gagal strategi ISI (*Import Substitution Industrialization*).

Namun masalahnya adalah pada saat yang sama dalam perdagangan internasional berlaku hukum "perdagangan bebas". Sistem perdagangan bebas pernah populer pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-21, tetapi kemudian tidak dipakai lagi setelah usai Perang Dunia I hingga berakhir Perang Dunia II. Negara-negara menjalankan kebijakan proteksionisme, tidak lagi ada perdagangan

bebas. Adalah GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang didirikan pada tahun 1948 yang berjasa untuk “membuka” lagi perdagangan bebas pada periode sesudah Perang Dunia II. Secara perlahan terjadi penurunan tarif, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa perdagangan bebas berhasil di tegakkan lagi. Ketika GATT diganti dengan WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1995, di seluruh dunia tengah terjadi gelombang pasang ideologi neoliberalisme yang dimotori oleh Milton Friedman dari Universitas Chicago, Amerika Serikat. Ideologi ini berhasil ditancapkan dalam WTO sehingga organisasi ini menjadi promotor perdagangan bebas yang fanatik.

Strategi pembangunan dengan mempercepat ekspor, sehingga mendapat hembusan angin kuat berupa dukungan dari WTO. Negara-negara melihat bahwa strategi mempercepat ekspor merupakan pilihan strategi yang lebih tepat dan melihat pula bahwa organisasi internasional dapat dijadikan sebagai kawan seperjalanan. Mereka memacu ekspor produk pertanian. Ternyata ini berdampak buruk bagi petani di negara-negara yang sedang berkembang (NSB).

Titik persoalannya adalah bahwa prinsip perdagangan bebas mengandaikan kesetaraan. Ini yang tidak terjadi ketika NSB berhadapan dan berdagang dengan negara maju. Negara yang sedang berkembang mengekspor produk pertanian tetapi dengan *term of trade* yang menguntungkan negara maju. Ini berakibat NSB selalu mengalami kesulitan untuk membayar impornya, dan dengan demikian termasuk juga barang-barang kebutuhan untuk produksi, terutama mesin.

Jadi, sebenarnya ada situasi yang mencekam. Untuk menyelenggarakan pembangunan, ekspor harus digenjut. Namun dengan meningkatnya ekspor, terutama ekspor *cash crops*, malah terjadi pemiskinan, bukan pembangunan, yang dialami oleh mayoritas penduduk (petani). *Term of trade* yang tidak seimbang membuat impor kebutuhan industri terhambat, dan untuk ini perlu dana tambahan berupa utang. Tetapi utang dan bunganya semakin membuat NSB terpuruk, lagi-lagi karena hasil ekspor tidak mencukupi untuk mencicil, apalagi melunasi utang. Ada dua arus globalisasi di sini: perdagangan internasional dan utang internasional, dan kedua arus ini menyeret NSB pada kondisi keterpurukan berkepanjangan (Wibowo, 2005).

Aspek Kelembagaan Pertanian di Desa

Aspek kelembagaan ini dapat berupa kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah, tergantung dari segi kepentingannya. Aspek kelembagaan sangat penting bukan saja dilihat dari segi ekonomi pertanian secara keseluruhan, tetapi juga segi ekonomi pedesaan terutama bagi pemberdayaan petani desa. “Bahkan Mosher (1974) mengidentifikasikan bahwa aspek kelembagaan merupakan syarat pokok yang diperlukan agar struktur pembangunan pedesaan dapat dikatakan maju. Menurut Mosher, ada tiga di antara lima syarat pokok yang harus ada yang dikategorikan sebagai aspek kelembagaan dalam “ Struktur Pedesaan Maju”, yaitu:

- a. *Adanya pasar*. Kelembagaan ekonomi seperti pasar ini penting bagi petani untuk dapat membeli kebutuhan faktor produksi seperti bibit, pupuk, obat-

obatan, dan sebagainya. Pasar juga berfungsi sebagai tempat petani menjual hasil pertaniannya, dan bahkan juga sekaligus tempat untuk membeli kebutuhan konsumsi.

- b. *Adanya pelayanan penyuluhan*. Kelembagaan penyuluhan adalah penting bagi petani untuk menerapkan teknologi baru yang ingin dicobanya, dan
- c. *Adanya lembaga perkreditan*. Lembaga ini harus dapat terjangkau oleh petani, bukan saja tersedia pada waktu petani membutuhkannya, tetapi juga murah. Kredit diperlukan oleh petani untuk membeli faktor produksi guna menerapkan teknologi baru (Soekartawi, 2002)”.

Permasalahan Petani Desa

Selain tantangan yang disebutkan di atas, juga masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami para petani terutama petani kecil, seperti:

1. Harga pupuk yang cukup tinggi, sehingga beban biaya produksi petani menjadi bertambah atau mereka tidak mampu membelinya yang mengakibatkan hasil panen rendah
2. Kurangnya lahan yang mereka garap
3. Harga panen mereka yang relatif murah terutama pada musim panen raya
4. Sektor pasar, bahwa konsumen Indonesia lebih menghargai hasil produk luar dibanding produk petani kita sendiri
5. Sarana dan prasarana yang cukup sulit terutama di desa-desa yang kurang terjangkau oleh masyarakat
6. Kurangnya lembaga pemberdayaan petani desa yang mampu melayani petani kecil secara langsung, baik itu berupa bimbingan, penyuluhan, informasi, maupun pembentukan jaringan kerja yang dapat menyokong pertanian, peternakan, dan perikanan mereka.

Menghadapi kenyataan itu, pemerintah dapat dipastikan sudah mendengar keluhan para petani. Pemerintah juga dipastikan sudah berupaya untuk membantu para petani agar kehidupan mereka tidak menderita, tapi karena persoalan yang dialami oleh negara ini masih demikian rumit dan berat, maka uluran tangan bagi para petani itu belum bisa dirasakan ada hasilnya terutama petani desa yang kebanyakan berupa petani penggarap dan petani gurem.

Balai Pemberdayaan Petani Desa

Negara Indonesia memang terkenal sebagai negara agraris. Dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dibuktikan dengan sumber daya alam pertaniannya yang sangat melimpah. Namun, kehidupan para petani Indonesia kini dihadapkan dalam sebuah dilema atau kondisi yang membingungkan. Jika mereka berhenti sebagai petani dan mencari pekerjaan lain yang tentu tidak mudah diperoleh, kehidupan keluarganya pasti terancam. Jika meneruskan pekerjaan sebagai petani, hasilnya tidak menguntungkan. Di samping itu, sebagian besar petani di Indonesia adalah petani

penggarap dan gurem. Sehingga makin sulit mengharapkan memperoleh penghasilan seperti yang diinginkan.

Petani kecil juga harus berhadapan dengan globalisasi yaitu WTO (*World Trade Organization*) dalam konteks pertanian, menuntut dilaksanakannya AoA (*Agreement on Agriculture*) yang berprinsip perdagangan bebas, yang justru merugikan petani terutama petani kecil karena harus berhadapan dengan keganasan kapitalis global. Dewan Pakar Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Suprpto menyatakan para petani Indonesia jadi miskin terus. Ia menilai kondisi yang diderita oleh para petani kita sudah sangat memprihatinkan. Sebab penghasilan petani yang hanya Rp150.000 hingga Rp200.000/bulan tak bisa dibuat apa-apa sekarang ini (*Harian umum Pelita*, 2010).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, mengatakan, penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 lebih lambat dibanding pada Maret 2009. Jumlah penduduk miskin selama Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Sedangkan pada Maret 2010 turun menjadi 31,02 juta orang. Penurunannya hanya 13,33 persen. Sebelumnya, pada Maret 2008 jumlah penduduk miskin mencapai 34,96 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Maret 2009 yang sebanyak 32,53 juta jiwa, maka penurunannya mencapai 14,15 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin tahun lalu itu sebanyak 2,43 juta jiwa, sedangkan tahun ini hanya turun 1,51 juta jiwa.

Di tempat terpisah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghimbau kepada para pedagang kebutuhan pokok, terutama sayuran, untuk mencari pasokan dari daerah lain. Direktur Bina Pasar dan Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Jimmy Bella, menjelaskan, pemerintah meminta bantuan dinas-dinas terkait di daerah untuk memberitahukan jumlah dan jenis hasil produksi bahan pokok di daerahnya. "Karena itu, apabila ada kelebihan produksi di satu daerah, maka pedagang di daerah lain bisa diarahkan mengambil pasokan barang di daerah tersebut," kata Jimmy. Menurut dia, dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi kekurangan pasokan bahan pokok di beberapa daerah, termasuk Jakarta. Itu akibat penurunan produksi sebagai dampak curah hujan tinggi (*Tabloit Online Desa Modern*, 2010).

Indikator lain ialah kehidupan petani, khususnya petani pangan di Jawa, belum banyak berubah yang begitu berarti. Kalaupun ada, kemajuan itu terjadi pada segelintir elite desa. Sementara, jutaan petani lainnya, hanya dapat bertahan hidup di atas lahan pertanian yang semakin hari semakin menyempit, serta hukum ekonomi pasar yang seringkali kurang menguntungkan petani kecil. Jumlah petani gurem bukannya berkurang, tetapi semakin meningkat. Selain itu, harga riil komoditas primer pertanian yang dihasilkan petani semakin hari semakin berkurang nilainya dibandingkan komoditas industri, biaya pendidikan dan kesehatan yang mereka butuhkan. Demikian pula biaya angkutan, dan harga sarana produksi yang selalu meningkat.

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi

Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan.

Balai Pemberdayaan Petani Desa merupakan bentuk dari manajemen baru dalam memberdayakan petani desa, karena berfungsi sebagai mediator agar mereka secara langsung dapat memperoleh bimbingan, penyuluhan, informasi, menjalin jaringan (*network*), dan sebagai pusat pengaduan petani kecil dalam permasalahan yang mereka hadapi. Mengingat pertanian merupakan masalah yang kompleks yang perlu kerja sama dari berbagai pihak, maka agar proses pemberdayaan ini berjalan dengan baik diperlukan kerja sama yang serius dalam mengatasi permasalahan petani. Sehingga peran dari pemerintah sangat penting terutama Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Daerah terutama yang berada di tingkat Kecamatan dalam membentuk dan menjalankan program tersebut. Balai pemberdayaan ini berlokasi di setiap Kecamatan yang diisi oleh perwakilan dari setiap dinas terkait dengan beranggotakan ketua atau perwakilan dari kelompok tani dari masing-masing desa.

Balai Pemberdayaan Petani Desa memiliki struktur yang jelas yang terdiri atas Direktur Balai Pemberdayaan Petani, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Petani, dan Tim Program Pemberdayaan. Secara struktural Balai Pemberdayaan Petani Desa ini akan dibawahi oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, dan Pendidikan.

Tabel 1. Peran Kepengurusan Balai Pemberdayaan Petani Desa(BPPD).

No	Jabatan	Peran
1.	Direktur BPPD	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan kinerja internal Balai Pemberdayaan Petani b. Menyelenggarakan rapat pengurus dengan waktu yang ditentukan c. Mewakili untuk kinerja eksternal
2.	Sekretaris Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengerjakan administrasi (surat menyurat, catatan rapat) b. Mewakili ketua jika berhalangan
3.	Bendahara Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola keuangan b. Membuat laporan keuangan per bulan
4.	Tim Program Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan membuat program b. Berkoordinasi dengan pihak petani untuk

		<p>mengadakan pembinaan atau penyuluhan dsb.</p> <p>c. Membuat standarisasi materi dan program yang harus disampaikan</p> <p>d. Membuat modul sebagai pegangan ketua atau perwakilan kelompok tani</p>
5.	Koordinator Petani Desa	<p>a. Mengadakan pembinaan untuk para perwakilan dari kelompok tani dari setiap desa</p> <p>b. Merekrut ketua atau perwakilan kelompok tani dari setiap desa</p> <p>c. Mengevaluasi kinerja para ketua atau perwakilan kelompok tani setiap secara berkala.</p>

Dalam pelaksanaannya diperlukan visi dan misi yang jelas agar menjadi pedoman para pelaku atau pengembang pertanian. Adapun visinya yaitu: *Pertama*, mengader petani agar berhasil, dicintai, dan dihargai, karena menghormati manusia dan alam. *Kedua*, menjadi mediator bagi petani dalam pertanian berkelanjutan dan menuju pertanian organik sebagai alternatif untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi di bidang lingkungan dan pangan. Sedangkan misi dari Balai Pemberdayaan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, pelayanan. Pemberdayaan petani desa juga membuka kesempatan untuk melayani berbagai pihak yang berkehendak untuk mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan adanya pelayanan yang bagus, dunia pertanian bisa membuat orang banyak ikut ambil bagian. Semakin banyak melayani, semakin banyak membuka kesempatan bekerja.

Kedua, pemberdayaan. Para petani desa hendaknya diperdayakan sesuai dengan bidang keahlian mereka. Pemberdayaan dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil. Antar-kelompok bisa ada kerja sama. Dengan demikian, dapat semakin kuat dalam membangun masyarakat sipil. Pada gilirannya juga akan memperkuat demokrasi.

Ketiga, partnership. Untuk bisa berhasil dalam bidang pertanian, perlu dijalin kerja sama dengan segala mitra kerja yang berkehendak baik. Dalam hal ini, semangat kerja sama harus menjadi sikap dan jalan hidup.

Keempat, pemasaran. Salah satu kelemahan petani ialah di bidang pemasaran. Biasanya, pada masa pascapanen, para petani menjual hasil produksi karena membutuhkan uang. Karena persediaan banyak, maka harga menjadi murah. Sehubungan dengan itu, perlu digarap pemasaran hasil-hasil pertanian sehingga mampu bersaing dalam isu pasar bebas dan isu globalisasi.

Kelima, pengembangan. Karena dunia semakin maju dan berkembang, lembaga pendidikan kader tani juga harus mengembangkan diri. Misalnya, membuka kesempatan kursus lanjutan, pengelolaan pemasaran yang lebih maju, dan membuka lembaga *research* yang berkelanjutan (Wartaya W, 2005).

Program Kerja Balai Pemberdayaan Petani Desa

Dalam menjalankan fungsinya maka Balai Pemberdayaan Petani Desa memiliki program kerja, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. **Memberikan pelayanan.** Pelayanan yang diberikan meliputi melayani berbagai pihak yang berkehendak untuk mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan. Yaitu dengan menyediakan tempat pengaduan masalah pertanian dan memberi pelayanan solusi masalah.
2. **Sebagai pusat informasi pertanian.** Informasi meliputi segala aspek yang dapat menunjang kemajuan pertanian, misalnya informasi harga produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, informasi musim, informasi permintaan produk pertanian atau pasar, hasil penelitian atau *reseach* pertanian, dan sebagainya.
3. **Memberikan penyuluhan.** Penyuluhan meliputi pemberian pengetahuan kepada petani lewat perwakilan kelompok tani dengan memberikan teknik atau tata cara baru dalam pertanian yang modern dan berkelanjutan, teknik pertanian organik, teknik peternakan dan perikanan yang sukses, teknik penggunaan pupuk dan obat, dan sebagainya.
4. **Pemberdayaan petani.** Pemberdayaan dapat berupa pendidikan kewirausahaan pada petani terutama generasi muda, melibatkan kaum muda dalam pengembangan pertanian, menjalin kerjasama antara petani dengan pihak lain seperti perusahaan atau industri pertanian agar dapat membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi lebih lanjut, dan seterusnya.
5. **Pembentuk partnership.** Untuk mewujudkan penguatan dalam bidang pertanian perlu dijalin kerja sama yang baik antara petani dan pihak lain yang berkecenderungan baik dalam pembangunan pertanian. Misalnya, menciptakan kerja sama yang baik dengan mempertemukan antara petani dengan Koperasi, Perusahaan, dan mitra kerja yang lain.
6. **Mendorong kelancaran perekonomian desa.** Dengan pesatnya promosi dan berubahnya gaya hidup masyarakat dan meningkatnya periklanan pada media masa, maka petani dan masyarakat pedesaan cenderung mengarah kepada sifat konsumerisme bukan produktif, sehingga pada saat panen mereka menjual semua hasil produksinya untuk mewujudkan keinginannya membeli barang elektronik, sepeda motor, mobil yang bukan digunakan untuk kegiatan produktif. Oleh sebab itu, perlu mendapat perhatian dan pembinaan yang serius bagi masyarakat di pedesaan, dengan upaya diversifikasi usahatani dan diversifikasi usaha lainnya dalam peningkatan pendapatan masyarakat serta pembinaan penggunaan dana untuk kegiatan produktif, sehingga pendapatan masyarakat dapat dikembangkan untuk melancarkan perekonomian di pedesaan.
7. **Program “Desa mandiri pangan menuju desa sejahtera”.** Program ini dilakukan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan karena ketergantungan yang tinggi pada beras. Pelaksanaan program dimulai dari pemerintah yang berkomitmen menyelesaikan kelaparan dengan pangan lokal. Indonesia memiliki banyak varian konsumsi pokok seperti singkong, ubi, ketela, jagung, sagu, gandum, kentang, talas dan masih banyak lagi.

Masalahnya orang masih berpikir bahwa singkong, ubi jalar, dan lainnya adalah ciri makanan menengah ke bawah. Paradigma ini harus diubah sehingga masyarakat mau mengkonsumsi makanan selain beras.

8. **Mempermudah jalannya subsidi.** Balai pemberdayaan berfungsi juga dalam mempermudah subsidi ke petani. Sehingga tidak terjadi penyelewengan atau salah sasaran pemberian subsidi.
9. **Sebagai tempat aspirasi petani.** Karena berfungsi sebagai tempat aspirasi petani secara langsung maka akan mempermudah pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya di bidang pertanian.

Dengan adanya program-program tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah rakyat kecil atau petani desa, sehingga dapat menumbuhkan keseriusan dalam perbaikan kesejahteraan baik dari petani itu sendiri maupun dari pihak lain yang juga berkepentingan dalam pembentukan kemajuan dan kemandirian pangan bangsa. Jika program tersebut benar-benar dijalankan, maka sekurang-kurangnya ada tiga permasalahan yang dapat diatasi. *Pertama*, dampak negatif globalisasi di bidang lingkungan dan pangan. Pertanian berkelanjutan dan pertanian organik bisa menjadi alternatif untuk menangkalnya. *Kedua*, pengurangan jumlah pengangguran. Semakin banyak tenaga kerja terserap dalam bidang pertanian, jumlah pengangguran menjadi berkurang. *Ketiga*, pencegahan urbanisasi. Semakin banyak orang desa berhasil sebagai petani, semakin sedikit orang pergi ke kota.

KESIMPULAN

Balai Pemberdayaan Petani Desa merupakan salah satu solusi yang penting dalam keseriusan menghadapi peningkatan kesejahteraan petani kecil dan juga dalam membangun kemandirian pangan bangsa di era globalisasi sekarang ini. Dalam mewujudkannya diperlukan keseriusan dari berbagai pihak terutama pemerintah dalam membentuk atau menyatukan petani dengan pihak lain atau mitra kerja yang juga berkepentingan dalam kemajuan pertanian bangsa. Dengan adanya program tersebut maka paling tidak dapat mengatasi tiga permasalahan bangsa, yaitu pengurangan jumlah pengangguran di desa, menangkali dampak negatif globalisasi dengan pertanian organik yang berkelanjutan, dan mencegah urbanisasi ke kota karena banyak petani desa yang berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Harian Umum Pelita* Edisi Kamis, 07 Januari 2010. <http://www.pelita.or.id/>[25 Februari 2010].
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Ed ke-4. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm 28-29.
- Susilo A. 2005. Pertanian dalam globalisasi. Di dalam: Winangun YW, editor. *Membangun Karakter Petani Organik Sukses dalam Era Globalisasi*; 2005; Salatiga. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm 51-52.
- Tabloid Online Desa Modern. 2010. Membengkak Angka Kemiskinan di NKRI. PT. Tunas Andalan Abadi. <http://www.desamodern.com/index.php?r=site/content/detail/2/1112> [26 Februari 2011].
- Wibowo I. 2005. Petani dalam jepitan globalisasi. Di dalam: Winangun YW, editor. *Membangun Karakter Petani Organik Sukses dalam Era Globalisasi*; 2007; Salatiga. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm 39-42.
- Winangun YW. 2007. *Membangun Karakter Petani Organik Sukses dalam Era Globalisasi*. Ed ke-3. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Hlm 95-98.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ketua Pelaksana Kegiatan:

Nama Lengkap : Saifur Rohman
NRP : C54080071
Fakultas/ Departemen : Perikanan dan Ilmu Kelautan
/ Ilmu dan Teknologi Kelautan
Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
Tempat tanggal lahir : Pati, 18 Februari 1988
Alamat : Jl. Kaligawe RT 03/01 Dororejo, Tayu,
Pati 59155
Karya Ilmiah yang pernah dibuat : -
Penghargaan Ilmiah : -

Bogor, 3 Maret 2011

Ketua

Saifur Rohman

C54080071

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Anggota Pelaksana Kegiatan :

Nama Lengkap : M. Budi Mulyawan
NRP : E34080109
Fakultas/ Departemen : Kehutanan/ Konservasi Sumberdaya
Hutan dan Ekowisata
Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
Tempat tanggal lahir : Pati, 5 Desember 1990
Alamat : Jl. Kampus Dalam, Kp. Cangkurawok
Ds. Babakan, Dramaga Bogor 16680.
Karya Ilmiah yang pernah dibuat : --
Penghargaan Ilmiah : --

Bogor, 3 Maret 2011
Anggota

M. Budi Mulyawan
E34080109

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

2. Anggota Pelaksana Kegiatan :

Nama Lengkap : Dimas Ardi Prasetya
NRP : F44090042
Fakultas/ Departemen : Fakultas Teknologi Pertanian/ Teknik Sipil dan Lingkungan
Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
Tempat tanggal lahir : Pati, 22 Desember 1990
Alamat : Balumbang Jaya, No. 30
Karya Ilmiah yang pernah dibuat : --
Penghargaan Ilmiah :---

Bogor, 3 Maret 2011

Anggota

Dimas Ardi Prasetya

F44090042

BIODATA DOSEN PENDAMPING

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lengkap dan gelar | : Meutia Samira Ismet,S.Si., M.Si. |
| b. NIP | : 19800325200701002 |
| c. Agama | : Islam |
| d. Alamat Rumah | : Komplek Laladon Indah
Jl. Asahan Baru No. 5 |
| e. No.telp/ HP | : 08158074363 |
| f. Fakultas / Program Studi | : Perikanan dan Ilmu Kelautan / Ilmu
dan Teknologi Kelautan |
| g. Bidang Keahlian | : Biologi Laut dan Keanekaragaman
Hayati Laut |
| h. Alamat Kantor | :Bagian Biologi Luat, Departemen
Ilmu dan Teknologi Kelautan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, IPB. Jl. Lingkar
Akademik Kampus IPB Darmaga |

Bogor, 2 Maret 2011

Dosen Pendamping

Meutia Samira Ismet,S.Si., M.Si.

NIP. 19800325200701002



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.